



Analisis Sarana dan Prasarana di KPA Kota Depok

Hafshah Noer Salsabillah^{1*}, Christian Wiradendi Wolor², Eka Dewi Utari³

^{1,2,3} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia.

E-mail: hasnursal21@gmail.com^{1*}, christianwiradendi@unj.ac.id², ekadewiutari@unj.ac.id³

Alamat Kampus: Jalan Rawamangun Muka No. 11, RT 11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220; Telepon: (021) 4898486

*Korespondensi penulis: hasnursal21@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the availability and quality of facilities and infrastructure at the AIDS Prevention Commission (KPA) in Depok City. KPA, as the institution responsible for HIV/AIDS prevention and control, requires adequate facility support to optimize its performance. Based on observations and preliminary interviews, it was found that KPA Depok City has basic facilities such as a secretariat office, meeting rooms, and office equipment. However, there are still several constraints, including limited space for activities, lack of supporting equipment such as projectors and sound systems, and operational work equipment that is not available at each employee's desk. This research uses a survey method by distributing questionnaires to 25 KPA Depok City staff to get an initial picture of the condition of facilities and infrastructure. The results of this research are expected to serve as a basis for optimizing the use of existing resources and identifying development needs in the future, so that KPA Depok City can increase the effectiveness of its programs in HIV/AIDS prevention efforts.*

Keywords: *Facilities and Infrastructure, AIDS Prevention Commission, HIV/AIDS, Depok City, Program Effectiveness*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketersediaan dan kualitas sarana prasarana di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Depok. KPA sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan HIV/AIDS memerlukan dukungan fasilitas yang memadai untuk mengoptimalkan kinerjanya. Berdasarkan observasi dan wawancara awal, ditemukan bahwa KPA Kota Depok telah memiliki sarana prasarana dasar seperti kantor sekretariat, ruang pertemuan, dan peralatan kantor. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan ruangan untuk kegiatan, kurangnya peralatan penunjang seperti proyektor dan sound system, serta peralatan operasional kerja yang belum tersedia di setiap meja karyawan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada 25 staf KPA Kota Depok untuk mendapatkan gambaran awal tentang kondisi sarana prasarana. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan di masa mendatang, sehingga KPA Kota Depok dapat meningkatkan efektivitas programnya dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS.

Kata kunci: Sarana Prasarana, Komisi Penanggulangan AIDS, HIV/AIDS, Kota Depok, Efektivitas Program

1. LATAR BELAKANG

Sarana dan prasarana merupakan komponen fundamental dalam mendukung keberhasilan suatu organisasi, terutama dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, kegiatan operasional cenderung tidak berjalan secara optimal dan dapat berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam dunia administrasi publik, pentingnya sarana dan prasarana telah ditegaskan oleh Robbins dalam (Syelviani, 2019) yang menyatakan bahwa fasilitas kerja berperan penting dalam memudahkan pegawai menyelesaikan tugasnya, sehingga berdampak positif terhadap kinerja dan produktivitas lembaga. Dalam konteks ini, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota

Depok yang memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan dukungan fasilitas yang tidak hanya lengkap tetapi juga relevan dengan kebutuhan program kerja mereka. Ketersediaan ruang kerja yang memadai, peralatan teknologi, media edukasi, serta sarana komunikasi menjadi penopang utama dalam pelaksanaan program penyuluhan, konseling, dan pelayanan masyarakat yang menjadi fokus utama KPA.

Namun, berdasarkan hasil observasi dan survei pra-riset yang dilakukan terhadap staf KPA Kota Depok, ditemukan bahwa sebagian besar merasa sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai. Dari 25 responden, sebanyak 60% menyatakan bahwa kondisi fasilitas kerja masih belum mendukung kegiatan operasional secara efektif. Bahkan, sebanyak 84% menyatakan bahwa fasilitas yang ada belum mampu mendukung pelayanan publik yang efisien dan tepat sasaran. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi antara lain adalah keterbatasan ruang untuk kegiatan sosialisasi, minimnya peralatan pendukung seperti proyektor dan sound system, serta ketimpangan distribusi perangkat kerja seperti komputer dan printer di antara pegawai. Hal ini tentu menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan program kerja yang seharusnya responsif dan menjangkau masyarakat secara luas.

Dalam tinjauan literatur, beberapa penelitian sebelumnya memang telah membahas hubungan antara sarana prasarana dan efektivitas kerja pegawai. Misalnya, (Pelealu et al., 2022) meneliti pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas kerja di lingkungan pemerintah provinsi dan menyimpulkan adanya pengaruh positif yang signifikan. Demikian pula, (Rismawati & Rafiie, 2022) menemukan bahwa kondisi fasilitas kerja yang baik mendorong peningkatan pelayanan publik di kantor kecamatan. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada instansi struktural pemerintahan, sedangkan KPA merupakan lembaga non-struktural yang memiliki karakteristik dan tantangan berbeda. KPA bekerja lintas sektor, melibatkan unsur komunitas, dan berfokus pada isu kesehatan masyarakat yang sensitif. Maka dari itu, pendekatan dan strategi pengembangan sarana prasarana di lembaga seperti KPA perlu dikaji secara khusus karena belum banyak disentuh dalam kajian akademik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai bentuk kontribusi terhadap penguatan kapasitas kelembagaan KPA di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh bagaimana kondisi sarana dan prasarana di KPA Kota Depok saat ini, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan dan kualitas fasilitas tersebut, serta merumuskan strategi pengembangan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS. Dengan adanya kajian ini, diharapkan pihak pengelola KPA maupun pemerintah

daerah dapat menjadikan hasil penelitian sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal penganggaran, perencanaan fasilitas, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan dua komponen penting yang saling berkaitan dalam mendukung kelancaran kegiatan organisasi. Sarana umumnya merujuk pada alat atau benda yang digunakan secara langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan, seperti peralatan kantor dan teknologi kerja, sedangkan prasarana merujuk pada fasilitas dasar seperti gedung dan lingkungan kerja yang meskipun tidak digunakan langsung, tetap memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas organisasi. Menurut KBBI, sarana adalah sesuatu yang mendukung pelaksanaan suatu kegiatan, sedangkan prasarana merupakan fasilitas dasar penunjang kegiatan. (Syahril, 2018) menegaskan bahwa sarana mencakup semua benda bergerak maupun tidak bergerak yang berfungsi mendukung efektivitas dan efisiensi kerja. Sementara itu, (Miski, 2015) menjelaskan bahwa prasarana menjadi komponen utama dalam pelaksanaan kegiatan karena menyediakan fondasi yang memungkinkan proses kerja berjalan dengan baik.

Berdasarkan pandangan para ahli, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai sangat menentukan efektivitas operasional suatu organisasi. Penggunaan fasilitas ini secara optimal dan bertanggung jawab oleh setiap anggota organisasi menjadi kunci tercapainya tujuan secara efisien. Dalam konteks pelayanan publik seperti di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), ketersediaan sarana dan prasarana yang baik menjadi faktor esensial untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara profesional dan berdampak.

2.2 Peran Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Publik

Peran sarana dan prasarana dalam organisasi khususnya dalam pelayanan publik, sangat krusial karena keduanya menjadi pendukung utama tercapainya tujuan kegiatan. Sarana berfungsi sebagai alat atau peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses operasional, sedangkan prasarana merupakan fasilitas dasar yang meskipun tidak digunakan secara langsung, tetap memiliki kontribusi penting dalam menunjang kelancaran kegiatan. (Saleh, 2019) menyatakan bahwa tanpa keberadaan sarana dan prasarana yang memadai, proses pelayanan publik tidak akan mampu mencapai hasil yang diharapkan

sesuai dengan rencana. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas fisik bukan hanya pelengkap, melainkan instrumen strategis dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas.

Pelayanan publik sendiri adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara dalam memenuhi hak masyarakat atas berbagai kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. (Hayat, 2017) menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan pemenuhan seluruh aspek kebutuhan dasar masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Mukron & Laksana dalam (Saputra, 2019) menambahkan bahwa pelayanan publik dilakukan dengan mengikuti aturan dan tata cara tertentu, yang menuntut efisiensi, ketepatan waktu, dan kepuasan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan layanan.

2.3 Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana

Strategi pengembangan sarana dan prasarana merupakan pendekatan sistematis yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan efektivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi diartikan sebagai ilmu dan seni dalam menggunakan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tertentu. (Jasmine, 2015) mendefinisikan strategi pengembangan sebagai proses peningkatan efektivitas organisasi yang mengintegrasikan aspirasi individu dan tujuan lembaga. Dalam konteks pengelolaan fasilitas, strategi ini mencakup proses perencanaan hingga evaluasi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana benar-benar mendukung keberhasilan program kerja.

(Fauzi, 2021) menekankan bahwa strategi pengembangan harus berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu efisiensi (penggunaan sumber daya secara optimal), efektivitas (ketepatan dalam pemanfaatan fasilitas), dan keberlanjutan (daya guna jangka panjang). Untuk itu, strategi pengembangan sarana dan prasarana sebaiknya dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

- a. **Perencanaan** yaitu meliputi identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas, serta penyusunan pengadaan yang mempertimbangkan anggaran dan kebijakan lembaga.
- b. **Pengadaan** yaitu memperoleh fasilitas melalui pembelian, pembuatan, hibah, atau sewa dengan memperhatikan kualitas dan kesesuaian kebutuhan.
- c. **Inventarisasi** yaitu pencatatan dan pengelompokan fasilitas yang dimiliki untuk mempermudah pengelolaan dan pemantauan.

- d. **Pemeliharaan** yaitu upaya perawatan preventif dan korektif agar fasilitas tetap dalam kondisi yang optimal.
- e. **Penghapusan** yaitu mengeluarkan fasilitas yang sudah tidak layak pakai dari inventaris guna efisiensi pengelolaan dan ruang.
- f. **Evaluasi** yaitu penilaian menyeluruh atas proses pengembangan untuk mengidentifikasi capaian dan kendala sebagai dasar perbaikan ke depannya.

2.4 Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana

Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana merupakan faktor krusial dalam mendukung kinerja organisasi. Ketersediaan merujuk pada kesiapan fasilitas untuk digunakan, sementara kualitas berkaitan dengan mutu dan kelayakan penggunaannya. Menurut (Ananda et al., 2023) pendekatan kolaboratif diperlukan untuk menganalisis kebutuhan serta merumuskan strategi peningkatan akses dan mutu infrastruktur. (Sarwadi & Q. Robbaniyah, 2022) menyebutkan bahwa sejumlah faktor utama memengaruhi ketersediaan dan kualitas sarana prasarana, antara lain:

- a. **Anggaran** karena ketersediaan dana sangat menentukan penadaan fasilitas.
- b. **Kebijakan dan Regulasi** yaitu mengarahkan prioritas alokasi sumber daya.
- c. **Sumber Daya Manusia (SDM)** sangat dibutuhkan untuk pengelolaan dan pemeliharaan.
- d. **Perencanaan dan Manajemen** untuk mempengaruhi efisiensi distribusi dan evaluasi.
- e. **Teknologi dan Evaluasi** yaitu mengubah standar kebutuhan sarana prasarana yang ada.

Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana juga merupakan elemen penting yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor - faktor tersebut perlu diperhatikan dalam merencanakan dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung program kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Tanpa adanya perencanaan dan dukungan infrastruktur yang kuat, efektivitas program-program KPA akan terganggu.

2.5 Analisis Kondisi Sarana dan Prasarana

Analisis sarana dan prasarana merupakan langkah penting untuk menilai kondisi, ketersediaan, dan kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan organisasi. Dalam konteks pelayanan publik seperti Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), sarana dan prasarana tidak hanya dianggap sebagai aset fisik, tetapi juga sebagai elemen strategis yang secara langsung

memengaruhi kualitas layanan. Menurut (Rasdiana & Riski Ramadani, 2021) organisasi pelayanan memiliki tanggung jawab besar dalam merespon kebutuhan masyarakat dan dituntut mampu menyediakan fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan program.

(Endah & Vestikowati, 2021) menegaskan bahwa pelayanan publik adalah isu kompleks yang menuntut peran birokrasi untuk responsif dan profesional. Dalam hal ini, sarana dan prasarana menentukan kapasitas lembaga seperti KPA dalam menjangkau target, menjaga mutu layanan, serta melaksanakan edukasi, konseling, dan koordinasi. Ketidacukupan fasilitas akan berakibat pada terbatasnya jangkauan layanan dan menurunnya efektivitas program kerja.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Analisis Sarana dan Prasarana di KPA Kota Depok” ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan observasi yang melibatkan beberapa partisipan. Pengertian penelitian kualitatif antara lain seperti yang dinyatakan oleh (Kusumawardani et al., 2015) adalah bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk analisis empiris atau investigasi yang sistematis menjadi suatu makna tertentu. Maksud sistematis disini adalah melalui proses yang direncanakan, mengikuti aturan yang berlaku dalam prinsip penelitian kualitatif. Sedangkan kata “empiris” dalam pengertian tersebut berarti suatu bentuk analisis atau investigasi yang bersifat langsung dari kejadian atau pengalaman yang sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dari sumber utama yang bersangkutan dengan tema penelitian atau tempat objek penelitian yang dilakukan. Sedangkan Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan informasi atau penjelasan kepada peneliti, melainkan media perantara (Sugiono, 2016). Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan berdasarkan populasi, dengan cara menggunakan metode *purposive sampling* untuk memperoleh sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian dan memenuhi kriteria yang dapat memberikan informasi yang relevan.

Berdasarkan dengan teori tersebut peneliti mengambil sebanyak empat sampel yang berhubungan dengan topik penelitian. Keempat sampel tersebut memberikan peneliti berbagai informasi atau aspek penting yang meningkatkan atau memperkaya pemahaman terhadap perspektif yang sedang diteliti. Teori lain yang menjadi dasar pemilihan empat sampel dalam bentuk table adalah sebagai berikut.

Tabel 1 *Qualitative Sample Size*

Research Approach	Rule of Thumb
Biography/Case Study	Select one case or one person.
Phenomenology	Assess 10 people. If you reach saturation prior to assessing ten people you may use fewer.
Grounded theory/ethnography/action research	Assess 20-30 people, which typically is enough to reach saturation.

Sumber: google.com

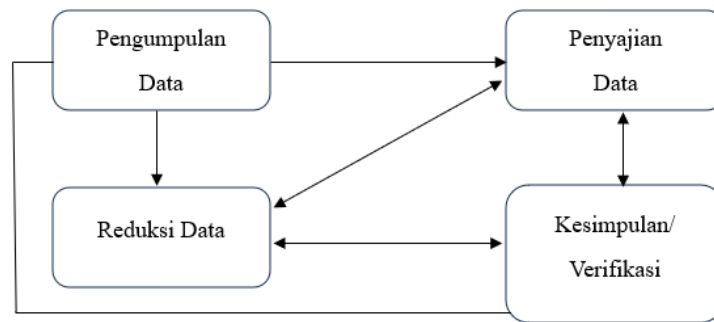
Melakukan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting agar mengetahui informasi dan data yang telah di dapatkan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Teknik triangulasi merupakan salah satu metode atau Teknik uji validitas ataupun pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Menurut (Kasiyan, 2015) Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian, mengumpulkan, dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik, sehingga dapat diperoleh kebenarannya jika didekati dari berbagai sudut pandang. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interperatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi dapat diartikan sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, Teknik, dan waktu (Mekarisce, 2020).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi, di mana peneliti mengumpulkan sumber data pada penelitian ini dari beberapa karyawan di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi pengumpulan data dengan melalui observasi, wawancara, dan melakukan dokumentasi terkait dengan data yang diperlukan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam sketsa berikut.

**Gambar 1 Sketsan Triangulasi Teknik Pengumpulan Data**

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Teknik analisis data adalah metodologi dan proses yang digunakan untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan memodelkan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna, mengambil kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan. Data tersebut didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dijabarkan dan dipilih yang penting untuk dipelajari dan dibuat kesimpulan. Adapun sistematika tahapan teknik analisis data meliputi empat langkah (Achmad & Pratama, 2024) sebagai berikut.



Gambar 2 Teknik Analisis Data

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber melalui metode seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul, dilakukan reduksi data, yaitu proses merangkum, memilih hal-hal pokok, serta menyederhanakan dan mentransformasikan data agar fokus pada informasi yang relevan, sehingga mempermudah analisis lanjutan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk terstruktur seperti deskripsi singkat, tabel, atau diagram agar memudahkan pemahaman dan pengambilan keputusan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu merumuskan hasil penelitian berdasarkan analisis dan bukti yang ada, serta menyempurnakannya secara berkelanjutan untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan, sehingga menghasilkan pengetahuan yang bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang ada di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Depok. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, peneliti telah melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan empat orang staf yang memenuhi kriteria penelitian, yaitu dua staf dari bagian Hubungan Masyarakat, satu staf dari bagian Admin Sosial Media, dan satu staf dari bagian Pengelola Program, serta melakukan observasi langsung ke lapangan sebagai metode pengumpulan data. Keempat partisipan tersebut dipilih karena kemampuan mereka dalam memberikan data penelitian yang mendalam dan detail mengenai kondisi sarana dan prasarana di KPA Kota Depok, sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Tabel 2 Data Partisipan

No.	Partisipan	Divisi	Jabatan	Lama Bekerja
1.	Karyawan A	Hubungan Masyarakat	Koordinator Hubungan Masyarakat	7 Tahun
2.	Karyawan B	Admin Sosial Media	Admin Sosial Media	2 Tahun
3.	Karyawan C	Pengelola Program	Pengelola Program	1 Tahun
4.	Karyawan D	Hubungan Masyarakat	Staf Hubungan Masyarakat	10 Tahun

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2025)

Dalam proses wawancara peneliti menyusun sejumlah pertanyaan yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai kondisi sarana dan prasarana yang ada, faktor yang dapat mempengaruhi serta strategi pengembangan apa yang dilakukan oleh KPA Kota Depok. Melalui wawancara terhadap empat staf di KPA Kota Depok yang memiliki pengalaman dan tanggung jawab yang berbeda-beda, namun semuanya terlibat dalam penggunaan sarana dan prasarana yang menjadi fokus pada penelitian ini, peneliti memperoleh berbagai tanggapan. Berikut ini merupakan rangkuman dari jawaban yang diberikan oleh masing – masing partisipan.

1) Kondisi Sarana dan Prasarana KPA Kota Depok

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Depok menghadapi tantangan signifikan terkait keterbatasan sarana dan prasarana yang menghambat efektivitas kinerja lembaga. Berdasarkan observasi langsung, ditemukan kondisi ruang kantor yang tidak memiliki ruang khusus untuk rapat, keterbatasan fasilitas meja dan kursi, serta minimnya ketersediaan perangkat teknologi elektronik.

Kondisi ini berpotensi berdampak negatif pada efisiensi kerja dan profesionalitas KPA Kota Depok dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan program kerja dan pelayanan optimal, mengingat keberadaan fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk mempermudah operasional dan kegiatan organisasi dalam menjalankan fungsinya.

Setelah melakukan wawancara, partisipan juga menjelaskan bagaimana kondisi sarana dan prasarana di KPA Kota Depok ini. Adapun hasil wawancara mengenai sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan pernyataan partisipan, yaitu:

Partisipan A:	Sarana dan prasarana di KPA bersifat standar seperti meja, kursi, laptop, dan printer, namun jumlahnya terbatas dan sebagian sudah tidak layak pakai. Pengecekan dilakukan setiap enam bulan atau setahun sekali, dan kekurangan ini berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Partisipan B:	Fasilitas utama mencakup komputer, laptop, meja, kursi, ATK, dan sofa, namun tidak semua staf mendapatkan fasilitas yang sama. Beberapa sarana masih layak pakai, tapi ada juga yang rusak karena jarang pengecekan, sehingga mempengaruhi pelayanan.
Partisipan C:	Sarana yang tersedia meliputi ruang kantor, ruang rapat, komputer, laptop, dan akses internet. Peralatan elektronik masih cukup layak, namun banyak sarana lain sudah usang dan perlu diganti. Pengecekan jarang dilakukan, yang berdampak pada kurang optimalnya pelayanan.
Partisipan D:	Fasilitas seperti laptop, meja, kursi, dan hanya satu unit printer dinilai tidak memadai. Sebagian masih bisa digunakan, namun banyak yang sudah tidak layak pakai karena pengecekan jarang dilakukan, dan hal ini menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat partisipan di KPA Kota Depok, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang tersedia masih dinilai kurang memadai untuk mendukung program kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa fasilitas seperti printer yang hanya tersedia satu unit, banyak perangkat seperti computer dan kursi sudah tidak layak pakai akibat usia pemakaian lama dan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Pengecekan fasilitas yang hanya dilakukan enam bulan hingga satu tahun sekali membuat sering terjadi kerusakan yang menghambat pekerjaan staf, seperti lambatnya pembuatan surat menyurat akibat printer hanya satu dan rusak.

Meskipun staf sudah berupaya untuk memanfaatkan fasilitas secara maksimal, keterbatasan sarana dan prasarana ini juga menyebabkan pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang optimal terutama dalam merespons kebutuhan masyarakat seperti media informasi. Sehingga dibutuhkan penambahan anggaran dari pemerintah untuk memberikan fasilitas baru dan meningkatkan frekuensi perawatan untuk mendukung efektivitas kerja di era digitalisasi.

2) Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana KPA Kota Depok

Keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas sarana prasarana di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Depok. Sebagai lembaga koordinasi, KPA tidak dapat langsung membeli peralatan yang dibutuhkan,

melainkan harus mengajukan proposal kepada dinas terkait, proses yang sering memakan waktu lama dan tidak selalu mendapat respon positif.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan partisipan, teridentifikasi beberapa faktor kendala dalam pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana di KPA Kota Depok. Faktor-faktor ini tidak hanya mempengaruhi ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan, tetapi juga berdampak pada kualitas kerja pegawai dalam menjalankan program penanggulangan AIDS di wilayah tersebut.

Adapun hasil wawancara mengenai faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan pernyataan partisipan, yaitu:

Partisipan A:	Kendala utama adalah keterbatasan anggaran, sehingga sarana dan prasarana yang tidak layak pakai belum bisa diganti, menyebabkan keterlambatan kerja. Laporan sudah diajukan, namun belum ada respons dari dinas.
Partisipan B:	Barang yang rusak tidak bisa diperbaiki dan belum bisa diganti karena belum ada anggaran, sehingga menghambat pekerjaan. KPA sudah mengajukan proposal pengadaan sarana dan prasarana baru.
Partisipan C:	KPA mengalami kendala anggaran dan tidak bisa langsung membeli peralatan karena harus melalui proses pengajuan. Ketidakpastian respons dari pihak terkait menjadi hambatan utama dalam peningkatan fasilitas.
Partisipan D:	Keterbatasan anggaran menyebabkan sarana tidak memadai dan pekerjaan tidak optimal. Proposal sudah dikirim ke pihak terkait, tetapi belum mendapat tanggapan.

Berdasarkan hasil pernyataan dari keempat partisipan, faktor utama yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas sarana prasarana di KPA Kota Depok adalah keterbatasan anggaran. Hal ini menyebabkan banyak fasilitas tidak layak pakai dan sulit diganti meskipun sudah diajukan melalui proposal. Selain itu, proses pengajuan anggaran ke dinas terkait sering menghambat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang mendesak. Kerusakan pada barang yang tidak dapat diperbaiki juga menjadi kendala yang sangat signifikan, karena ketiadaan anggaran untuk membeli barang baru

berdampak langsung pada lambatnya proses kerja dan menurunnya efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

3) Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana KPA Kota Depok

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi dan faktor yang mempengaruhi sarana dan prasarana di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Depok, dapat dirumuskan strategi pengembangan. Untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan HIV/AIDS, KPA Kota Depok memerlukan strategi pengembangan sarana dan prasarana. Strategi yang dapat dilakukan adalah pengajuan penambahan anggaran dana khususnya untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, karena sesuai dengan harapan para partisipan terhadap pemerintah atau instansi terkait.

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara langsung, terdapat beberapa strategi pengembangan yang telah dilakukan atau direncanakan untuk memperbaiki kondisi sarana dan prasarana di KPA Kota Depok ini. Strategi pengembangan sarana dan prasarana yang dilakukan dapat mencerminkan upaya proaktif lembaga dalam menghadapi keterbatasan dan birokrasi pengadaan.

Wawancara yang dilakukan secara langsung juga terlihat sudah adanya strategi yang dapat dilakukan oleh staf Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Depok untuk membuat sarana dan prasarana yang ada menjadi lebih memadai. Adapun hasil wawancara mengenai strategi yang sudah dilakukan ataupun rencana ke depan mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan pernyataan partisipan, yaitu:

Partisipan A:	Mengusulkan penambahan anggaran dan percepatan proses pengajuan agar pekerjaan lebih optimal. Sarana digital seperti komputer, laptop, handphone, printer, dan tablet perlu diprioritaskan. Selain itu, pemeliharaan harus dijadwalkan lebih rutin, tidak hanya enam bulan atau setahun sekali.
Partisipan B:	Mengharapkan anggaran untuk mengganti sarana yang rusak agar pekerjaan lebih mudah. Proposal dan keluhan sebaiknya ditindaklanjuti dengan cepat. Prioritas perlu diberikan pada sarana yang sudah tidak layak, serta dibuat jadwal pemeliharaan yang lebih teratur.

Partisipan C:	Berharap pemerintah menambah anggaran dan melengkapi kebutuhan agar program KPA berjalan lancar. Sarana yang mendukung program harus diprioritaskan. Setelah pengadaan, perawatan juga perlu ditingkatkan agar fasilitas tetap dalam kondisi baik.
Partisipan D:	Penambahan anggaran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sarana prasarana dan mendukung kinerja KPA. Sarana digital menjadi prioritas utama karena penting di era digital. Pemeliharaan yang lebih intensif diperlukan untuk mencegah kerusakan dan menjaga performa kerja.

Berdasarkan pernyataan dari keempat partisipan, strategi pengembangan sarana dan prasarana di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Depok untuk meningkatkan efektivitas program yaitu mencakup penambahan anggaran khusus pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, terutama untuk kebutuhan digitalisasi seperti computer, laptop, handphone, printer, dan tablet yang menjadi prioritas di era digital. Selain itu, diperlukan penjadwalan pemeliharaan yang lebih intensif untuk mencegah kerusakan dan memastikan fasilitas selalu dalam kondisi yang optimal. Para partisipan juga menekankan pentingnya respon cepat dari pemerintah atau dinas terkait terhadap pengajuan proposal anggaran agar kebutuhan mendesak dapat segera dipenuhi.

4.2 Pembahasan

1) Kondisi Sarana dan Prasarana KPA Kota Depok

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Depok masih menghadapi keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana yang berdampak pada efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik. Meskipun tersedia peralatan dasar seperti meja, kursi, laptop, komputer, dan printer, jumlah dan kondisinya tidak mencukupi kebutuhan kerja. Sebagian peralatan bahkan sudah tidak layak pakai, sehingga menghambat kelancaran aktivitas administratif maupun operasional.

Masalah utama yang ditemukan adalah belum adanya sistem manajemen aset yang baik serta minimnya pemeliharaan sarana prasarana. Pengecekan hanya dilakukan setiap enam bulan hingga satu tahun sekali, menyebabkan banyak peralatan mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan secara optimal. (Zohriah, 2015) menyatakan bahwa

pemeliharaan berkala penting dilakukan untuk menjaga kondisi sarana prasarana agar tetap fungsional dan tahan lama.

Kondisi ini secara langsung berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Aprilla et al., 2020) menegaskan bahwa sarana dan prasarana yang tidak memadai dapat menurunkan efisiensi kerja pegawai serta kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan jumlah, kualitas, dan pemeliharaan sarana prasarana secara berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak bagi KPA Kota Depok agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

2) Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana KPA Kota Depok

Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Depok dipengaruhi oleh berbagai faktor, dengan keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama. Sebagai lembaga koordinatif, KPA tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan pengadaan, sehingga harus melalui proses pengajuan proposal kepada dinas terkait. Proses ini seringkali tidak berjalan lancar karena anggaran terbatas dan respons dari pihak terkait yang lambat. Menurut (Harefa et al., 2022) pengelolaan anggaran yang efektif sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program dan penyediaan fasilitas yang memadai.

Selain anggaran, birokrasi yang panjang juga menjadi penghambat utama dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana. Pengajuan yang harus melewati banyak tahapan membuat proses pengadaan menjadi lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan mendesak. (Endah & Vestikowati, 2021) menjelaskan bahwa birokrasi yang berbelit dapat menghambat kinerja lembaga pemerintah, terutama dalam penyediaan fasilitas operasional. KPA Kota Depok juga menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga, yang berdampak pada kurang optimalnya distribusi dan pemenuhan kebutuhan.

Di samping itu, perencanaan pengelolaan aset yang kurang matang menyebabkan pengadaan sarana prasarana lebih bersifat reaktif daripada strategis. Ketiadaan prioritas pada pemeliharaan preventif juga berdampak pada penurunan kualitas fasilitas yang tersedia. Pemeliharaan yang hanya dilakukan enam bulan hingga satu tahun sekali tidak cukup untuk menjaga kondisi sarana tetap optimal. (Harefa et al., 2022) menekankan bahwa pemeliharaan preventif dapat menghemat biaya jangka

panjang serta mencegah kerusakan yang lebih besar. Maka, diperlukan perbaikan dalam perencanaan dan strategi pengelolaan aset secara berkelanjutan di KPA Kota Depok.

3) Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana KPA Kota Depok

Untuk menghadapi kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai, KPA Kota Depok perlu menerapkan strategi pengembangan yang terstruktur dan berkelanjutan. Strategi utama yang diusulkan adalah pengajuan penambahan anggaran khusus untuk pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Penyusunan proposal anggaran harus didasarkan pada data kebutuhan aktual agar memperoleh dukungan dari pemerintah daerah. Menurut (Alfian et al., 2015) alokasi anggaran yang tepat sasaran merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan program pemerintah.

Selain penguatan anggaran, prioritas pengadaan perangkat digital menjadi langkah strategis yang sangat penting. Peralatan seperti komputer, laptop, dan printer harus menjadi fokus utama karena sangat menunjang pelaksanaan tugas di era digital. (Etin Indrayani, 2023) menyatakan bahwa transformasi digital dalam organisasi publik harus dimulai dengan infrastruktur teknologi yang memadai. Oleh karena itu, KPA perlu memastikan ketersediaan perangkat digital sebagai bagian dari adaptasi terhadap digitalisasi pelayanan publik.

Strategi lainnya mencakup peningkatan frekuensi pemeliharaan sarana dan prasarana. Saat ini, pemeliharaan hanya dilakukan enam bulan hingga satu tahun sekali, yang dinilai tidak cukup untuk menjaga kondisi fasilitas tetap optimal. (Cahyani et al., 2023) menekankan bahwa pemeliharaan rutin sangat penting untuk memperpanjang masa pakai fasilitas dan mencegah kerusakan berat. Maka, penyusunan jadwal pemeliharaan yang lebih sistematis dan berkala menjadi hal yang perlu segera diterapkan.

KPA juga perlu mengembangkan sistem manajemen aset yang lebih efektif. Sistem ini dapat membantu dalam pencatatan, pemantauan, dan perencanaan pengadaan sarana prasarana di masa depan. Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, KPA Kota Depok diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan fungsi koordinatifnya secara maksimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Depok secara umum masih belum memadai untuk mendukung efektivitas kerja dan pelayanan publik. Fasilitas seperti meja, kursi, komputer, laptop, dan printer memang tersedia, namun jumlahnya terbatas dan banyak yang sudah tidak layak pakai. Pemeliharaan yang jarang dilakukan, yaitu hanya enam bulan hingga satu tahun sekali, menyebabkan banyak peralatan mengalami kerusakan dan tidak segera diperbaiki, sehingga menghambat kinerja staf dan menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Faktor utama yang memengaruhi rendahnya ketersediaan dan kualitas fasilitas adalah keterbatasan anggaran serta prosedur birokrasi pengadaan yang panjang. Sebagai lembaga koordinator, KPA harus mengajukan proposal kepada instansi terkait untuk memenuhi kebutuhannya, yang sering kali tidak mendapat respons cepat. Meski begitu, KPA telah merancang beberapa strategi pengembangan seperti pengajuan anggaran rutin, penentuan skala prioritas, pemanfaatan teknologi digital, serta perencanaan pemeliharaan yang lebih terstruktur. Strategi ini diharapkan mampu memperbaiki kondisi sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas layanan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Depok.

2) Saran

Penelitian ini merekomendasikan beberapa pendekatan untuk studi masa depan, antara lain memperpanjang periode penelitian untuk hasil yang lebih maksimal, memperbanyak jumlah partisipan, serta menggunakan metode yang lebih beragam seperti pendekatan kualitatif dengan dua variabel atau metode kuantitatif. Pendekatan yang lebih komprehensif ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan representatif mengenai kondisi sarana dan prasarana KPA Kota Depok. Untuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Depok sendiri, peneliti merekomendasikan tiga strategi utama yang perlu diterapkan. Pertama, KPA perlu secara aktif dan konsisten mengajukan anggaran pengadaan sarana dan prasarana, terutama perangkat digital yang sangat dibutuhkan, kepada pemerintah daerah. Kedua, penyediaan ruang kerja dan fasilitas khusus untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan masyarakat perlu diprioritaskan. Ketiga, penyusunan jadwal pemeliharaan rutin secara berkala sangat penting untuk memastikan fasilitas yang ada tetap berfungsi dengan baik dan memiliki umur pakai yang lebih panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Alfian, D., Iriyadi, I., & Pramiudi, U. (2015). Anggaran biaya sebagai alat pengendalian manajemen pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 1(3), 193–202. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v1i3.244>
- Ananda, R., Irmawan, B., Juanda, S., & Aswadi, M. K. (2023). Analisis pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dasar. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 9672–9678. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3297>
- Aprilla, G., & dkk. (2020). Pengaruh sarana dan prasarana terhadap kinerja pegawai perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kota Pontianak. *OPTIMISM Journal of Management Business Entrepreneurship and Organization*, 2(3), 1–13. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpdb/article/viewFile/50198/75676590958>
- Cahyani, F. N., Zulkarnain, G. P., & Anggoman, T. K. (2023). Analisis perencanaan strategi operasional lift bandara terhadap keselamatan pengunjung bandara. *Jurnal Strategi dan Operasional*, 1(3), 124–142.
- Endah, K., & Vestikowati, E. (2021). Birokrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. *Jurnal MODERAT*, 7(3), 648.
- Fauzi, M. I. F. (2021). Manajemen sarana dan prasarana pendidikan. *Al-Rabwah*, 14(2), 90–115. <https://doi.org/10.55799/jalr.v14i02.46>
- Harefa, N. B., Zebua, S., & Bawamenewi, A. (2022). Analisis efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). *Warta Dharmawangsa*, 16(4), 1002–1009. <https://doi.org/10.46576/wdw.v16i4.2450>
- Hayat. (2017). *Manajemen pelayanan publik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Indrayani, E. (2023). *Integrasi sistem layanan digital* (Issue January).
- Jasmine, K. (2015). *Strategi pengembangan: Penambahan natrium benzoat dan kalium sorbat (antiinversi) dan kecepatan pengadukan sebagai upaya penghambatan reaksi inversi pada nira tebu*, 16–48.
- Kasiyan. (2015). Kesalahan implementasi teknik triangulasi pada uji validitas data skripsi mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY. *Imaji*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/imaji.v13i1.4044>
- Kusumawardani, N., Soerachman, R., Laksono, A. D., Indrawati, L., Sari, P., & Paramita, A. (2015). *Penelitian kualitatif di bidang kesehatan* (Vol. 53, Issue 9). PT Kanisius.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Miski, R. (2015). Pengaruh sarana dan prasarana terhadap hasil belajar siswa. *Tadbir Muwahhid*, 4(2), 69–73.
- Pelealu, R. R., Nayoan, H., & Sampe, S. (2022). Pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas kerja pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Governance*, 2(2), 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/42147>
- Rasdiana, & Ramadani, R. (2021). Responsivitas penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 249–265. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i2.76>

- Rismawati, M., & Rafiie, S. A. K. (2022). Analisis sarana dan prasarana dalam efektivitas kerja pegawai pada Kantor Kecamatan Johan Pahlawan. *Journal of Public Service*, 2(1), 67. <https://doi.org/10.35308/jps.v2i1.5176>
- Saleh, K. (2019). *Analisis sarana dan prasarana pelayanan wajib pajak pada Kantor Samsat Binjai*.
- Saputra, R. (2019). Transparansi pelayanan publik di Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 53(9), 10–39.
- Sarwadi, Q., & Robbaniyah, R. L. (2022). *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(2), 156–168.
- Sugiono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Issue January).
- Syelviani, M. (2019). Pentingnya sarana dan prasarana terhadap efisiensi kerja pegawai Puskesmas Teluk Pinang. *Jurnal Analisis Manajemen*, 5(2), 19–32.
- Zohriah, A. (2015). Analisis standar sarana dan prasarana. *Tarbawi*, 1(2), 53–62.